

Pada Tanggal 3 Agustus, Pemerintah Indonesia telah mengumumkan 113.134 kasus COVID-19 yang dikonfirmasi di semua provinsi di Indonesia, dengan 5.302 kematian. Pemerintah juga telah mengumumkan bahwa 70.237 orang telah pulih dari penyakit.

Untuk mengintegrasikan kebijakan kesehatan dan kebijakan ekonomi di Indonesia, pada 20 Juli Presiden telah membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020. Presiden menegaskan bahwa penanganan kesehatan tetap menjadi prioritas dan meminta Komite untuk memberikan perhatian khusus pada Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua, dimana kedelapan provinsi ini berkontribusi 74 persen pada kasus terkonfirmasi di Indonesia.

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menjalankan program 'satu juta masker' untuk mendukung adaptasi kebiasaan baru. Program ini menasar komunitas di rumah-rumah ibadah di DKI Jakarta, komunitas seniman, pegawai di lingkungan pemerintah daerah Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara. Waktu pelaksanaan berlangsung selama 10 hari sampai dengan minggu pertama Agustus.

Pemerintah Indonesia telah menjalankan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk penanganan COVID-19, yang memiliki alokasi dana total Rp. 695,2 triliun di tahun 2020. Per tanggal 22 Juli, realisasi anggaran program ini secara keseluruhan baru mencapai Rp. 136 triliun (19 persen dari total alokasi). Pada saat yang sama, realisasi stimulus Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak pandemi COVID-19 baru sekitar 25 persen dari alokasi Rp. 123,46 triliun. Anggaran untuk UMKM ini dialokasikan untuk restrukturisasi kredit UMKM di bank milik negara senilai Rp. 78,78 triliun. Lalu, subsidi bunga senilai Rp. 35,28 triliun, belanja imbal jasa penjaminan Rp. 5 triliun, dan Pajak Penghasilan (PPh) final UMKM ditanggung pemerintah Rp. 2,4 triliun. Pada 23 Juli, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengumumkan bahwa Pemerintah akan memberikan bantuan hibah modal kerja kepada 12 juta pelaku UMKM. Setiap pelaku UMKM mendapatkan bantuan senilai Rp. 2,4 juta, melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir.

Program PEN memiliki komponen dukungan untuk Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp. 23,7 triliun. Komponen ini terdiri dari Dana Insentif Daerah (DID) Pemulihan Ekonomi sebesar Rp. 5 triliun, cadangan DAK Fisik sebesar Rp. 8,7 triliun dan pinjaman bagi Pemerintah Daerah sebesar Rp. 10 triliun. Pemanfaatan pinjaman ini sudah dimulai oleh Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat, yang mengusulkan kebutuhan sebesar Rp.12,5 triliun (Jakarta) dan Rp. 4 triliun (Jawa Barat) untuk pembiayaan penanganan COVID-19 dan pemulihan kegiatan ekonomi di tahun 2020 dan 2021.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang dilaksanakan sejak Bulan April telah menjangkau 74.877 dari 74.953 desa (99 persen) per tanggal 26 Juli. Hampir seluruh desa juga telah menetapkan calon keluarga penerima manfaat melalui musyawarah desa. Tahap I sampai dengan tahap III masing-masing keluarga mendapat Rp. 600.000 per bulan, sedangkan tahap IV sampai dengan tahap VI masing-masing keluarga menerima Rp. 300.000 per bulan. Capaian penyalurannya per Tanggal 26 Juli dapat dilihat sebagai berikut:

Tahap I – dimulai April	7.426.707 keluarga di 74.877 desa	Rp. 4,69 triliun
Tahap II - dimulai Mei	6.757.859 keluarga di 64.515 desa	Rp. 4,05 triliun
Tahap III - dimulai Juni	3.453.286 keluarga di 35.857 desa	Rp. 2,07 triliun.
Tahap IV - dimulai Juli	58.494 keluarga di 645 desa	Rp. 17,55 miliar

Relawan Covid-19 Nasional (RECON) merupakan inisiatif dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bersama dengan Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI) dan Asosiasi

Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AI PKI). Kelompok relawan ini meluncurkan Gerakan 31 Hari Tantangan Siap Adaptasi yang merupakan kelanjutan dari program Komunikasi Informasi dan Edukasi Daring yang dilakukan oleh RECON sejak bulan April. Kegiatan ini diluncurkan secara daring pada 30 Juli, melibatkan 15.000 relawan yang memiliki beragam latar belakang, termasuk mahasiswa program studi kesehatan dan non kesehatan, tenaga medis profesional, dan masyarakat umum yang peduli terhadap kesehatan. Bagi anggota masyarakat yang ingin mengakses bantuan dari relawan: <https://relawan.kemdikbud.go.id/korona/>

DKI Jakarta telah memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya transisi menuju Adaptasi Kebiasaan Baru hingga 13 Agustus. Pada PSBB transisi dilakukan pelonggaran pembatasan kegiatan ekonomi dan sosial budaya secara bertahap. Masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan syarat menerapkan protokol kesehatan

Perpanjangan masa PSBB juga dilakukan oleh kabupaten/kota di Jawa Barat (Kota Bogor, Depok, Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Bekasi) yang berbatasan dengan Jakarta sampai 16 Agustus. Sementara, pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di 22 kabupaten/kota di Jawa Barat diberlakukan sampai 29 Agustus.

Pemerintah Provinsi Bali membuka aktivitas pariwisata untuk wisatawan domestik pada 31 Juli, dengan mengeluarkan aturan persyaratan kunjungan wisatawan ke Bali (melalui Surat Edaran 15243 tahun 2020). Setiap wisatawan yang berkunjung ke Bali wajib melengkapi aplikasi melalui <https://lovebali.baliprov.go.id>, harus bebas COVID-19 dengan menunjukkan surat Keterangan hasil negatif uji PCR (Polymerase Chain Reaction) atau setidaknya hasil non-reaktif rapid test. Masa berlaku surat keterangan kesehatan tersebut adalah paling lama 14 hari sejak dikeluarkan. Bali juga bersiap untuk menerima kembali wisatawan mancanegara, yang akan dimulai pada 11 September 2020. Akibat pandemi COVID-19, sektor pariwisata Bali mengalami kerugian sekitar Rp. 48,5 triliun, sementara Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan III 2020 akan berada dalam kisaran -9,4% sampai dengan -9% (year-on-year). Sedangkan prakiraan triwulan II 2020 sebesar -9,5% sampai dengan -9% (year-on-year).

Berikut ini adalah sorotan utama dari klaster kemanusiaan dan bidang-bidang prioritas selama dua minggu terakhir:

Kesehatan: Revisi pedoman Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial sedang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, dengan masukan dari sub-klaster Dukungan Psikososial diharapkan diterima pada 7 Agustus.

Logistik: Dukungan aktivasi koordinasi ditingkat daerah akan diinisiasi dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan. Dikarenakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan tidak lagi memberikan relaksasi untuk beberapa barang import COVID-19, diperlukan diseminasi informasi tentang biaya bea dan cukai bagi para calon importer.

Nutrisi: Draft Panduan Operasional Penanganan Gizi Pada Situasi Bencana telah disusun bersama dengan Kementerian Kesehatan.

Pendidikan: Melakukan kampanye Kembali Belajar di Tahun Ajaran 2020/2021. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang mengupayakan relaksasi regulasi telekomunikasi terkait ijin siaran radio komunitas yang diinisiasi oleh sekolah agar dapat menunjang Pembelajaran Jarak Jauh.

Pemulihan Dini: Dengan berfokus di tingkat nasional dan tujuh provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Papua, Riau, dan Gorontalo), sedang disiapkan dukungan koordinasi dalam rangka pemulihan pasca pandemi, pelaksanaan analisa pembiayaan inovatif. Advokasi dan pelatihan terus dilakukan bagi 'frontliner' Kekerasan Berbasis Gender di provinsi tersebut, serta 24 pelatihan dan kegiatan advokasi telah dilakukan mengenai perlindungan terhadap penyandang disabilitas di enam kota.

Kelompok kerja Pelibatan Masyarakat: memberi dukungan kepada kelompok atau forum di tingkat provinsi: di Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Bali. Kelompok ini sedang mengupayakan agar Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 yang baru (versi 5, KMK HK 01.07/Kemkes/413/2020) dapat dipahami oleh masyarakat umum dan diterjemahkan kedalam Bahasa Isyarat.

Terdapat 262 lembaga non-pemerintah dengan lebih dari 3.000 kegiatan yang tercatat dalam 3W - siapa melakukan apa di mana - sampai saat ini. Bidang kegiatan yang paling banyak meliputi kesehatan, kesehatan reproduksi dan air, sanitasi

dan higiene, sedangkan wilayah geografis dengan jumlah kegiatan terbanyak adalah di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah. Per 30 Juli, dukungan pendanaan multipihak non-pemerintah dalam penanganan COVID-19 dan dampaknya mencapai US\$ 156,6 juta. Data dapat dilaporkan melalui salah satu dari tiga format berikut: Kobo Toolbox, Google form atau MS Excel, pada tautan berikut:

KoBo Toolbox:

<https://bit.ly/BersatuLawanCovid19> (Bahasa Indonesia)

https://bit.ly/BersatuLawanCovid19_EN (Bahasa Inggris)

Google form:

https://bit.ly/BersatuLawanCovid19_GoogleForm (Bahasa Indonesia)

https://bit.ly/COVID-19_Googleform_EN (Bahasa Inggris)

MS Excel:

https://bit.ly/3W_COVID19_Excel

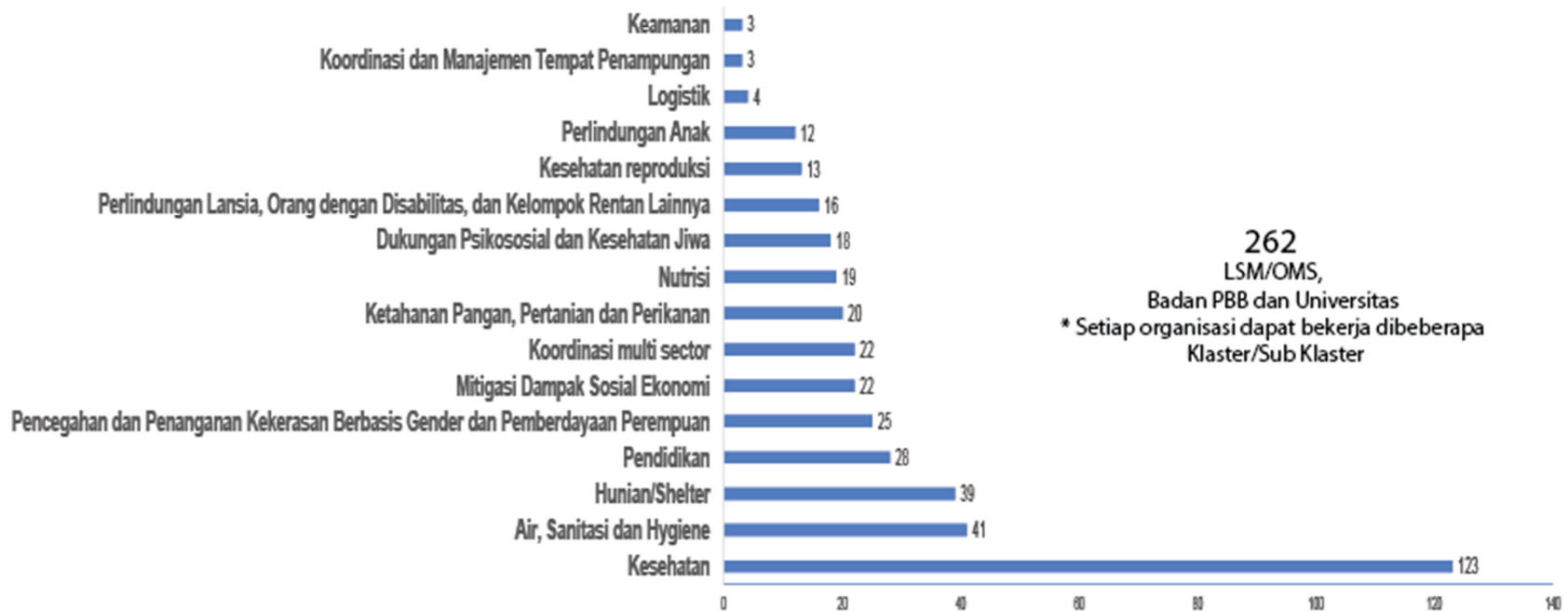
Untuk informasi lebih lanjut tentang 3W, silakan hubungi Rifkianto Aribowo di rifkianto.aribowo@un.org.



KOLABORASI MULTI-PIHAK #BersatuLawanCovid19



JUMLAH LSM/OMS, BADAN PBB DAN UNIVERSITAS
Per 30 JULI 2020

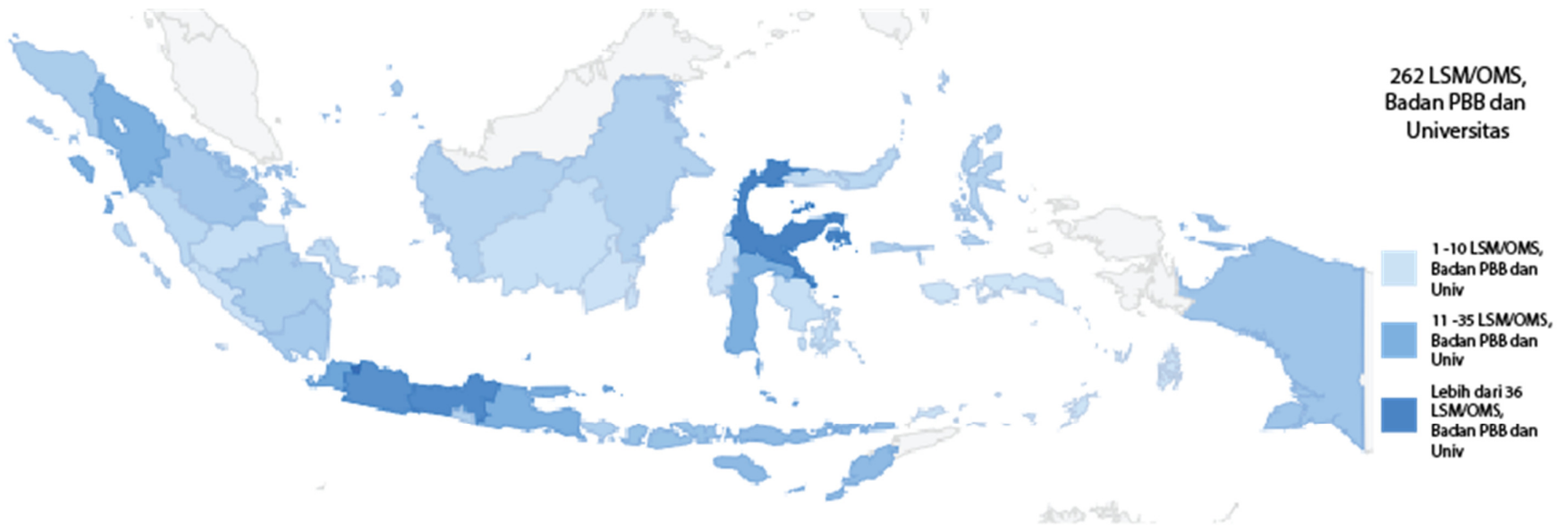


Isi dukungan Organisasi anda di tautan berikut:
bit.ly/BersatuLawanCovid-19

Desk Relawan - didukung oleh MPBI-MDMC-UNOCHA
LSM: Lembaga Swadaya Masyarakat
OMS: Organisasi Masyarakat Sipil

The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to Coordinate the global emergency response to save lives and protect people in humanitarian crises. We advocate for effective and principled humanitarian action by all, for all.
www.unocha.org

JUMLAH LSM/OMS, BADAN PBB DAN UNIVERSITAS BERDASARKAN WILAYAH KERJA PROVINSI



JUMLAH KEGIATAN DI PROPINSI

